



Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat



LAPORAN KINERJA

PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA BARAT
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2024

Nomor : OT.04.03/LHP-96/PW27/6/2024

Tanggal : 28 Maret 2024



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT**

Jalan Angkasa Mulyono, Amban, Manokwari, 98312

Telepon: (0986) 2217088, Faksimile: (0986) 2217087

E-mail: papua.barat@bpkp.go.id, Website: <https://www.bpkp.go.id/pabar.bpkp>

Nomor : OT.04.03/LHP-96/PW27/6/2024

28 Maret 2024

Lampiran : Satu berkas

Hal : Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP
Provinsi Papua Barat sampai dengan
Triwulan I Tahun 2024

Yth. Kepala BPKP
di Jakarta

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola BPKP Nomor OT.04/S-306/SU/01/2024 tanggal 18 Maret 2024 hal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2024, dengan ini kami menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat sampai dengan triwulan I tahun 2024.

A. Pencapaian Kinerja

Capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat sampai dengan triwulan I tahun 2024 atas masing-masing sasaran kegiatan (saskeg) adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Rata-rata Capaian TW I 2024
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	33,33%
2	Meningkatnya kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP	0,00%
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	0,00%
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	60,71%
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	25,00%
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	54,55%
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Unit Kerja	85,71%

Rincian kinerja masing-masing sasaran kegiatan (saskeg) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah

Rata-rata capaian saskeg 1 - Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah adalah 33,33%. Capaian saskeg 1 ini diukur dari 3 (tiga) indikator kinerja (IK) yaitu:

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target		Realisasi s.d. TW I 2024	Capaian		Rata-Rata Capaian TW I 2024
			Setahun	s.d. TW I 2024		Setahun	s.d. TW I 2024	
I	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah							
1.1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	921,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	33,33%
1.2	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	112.930,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1.3	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	52.169,30	52,62	52,62	0,10%	100,00%	

a. Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi

Sampai dengan triwulan I tahun 2024, IK “Nilai optimalisasi penerimaan daerah” belum terealisasi. Dengan demikian capaian IK “Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi” adalah sebesar 0,00% dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar Rp921.000.000,00.

Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan I tahun 2023 adalah tetap sebesar 0,00%, sedangkan jika dibandingkan dengan target dalam Renstra 2020-2024 maka IK ini tercapai 0,00% dari target akhir tahun 2024 sebesar Rp345.000.000,00.

Belum terealisasinya target IK ini disebabkan oleh APP Pengawasan atas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) belum dilaksanakan dan akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2024.

b. Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah

Sampai dengan triwulan I tahun 2024, IK “Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah” belum terealisasi. Dengan demikian capaian IK “Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah” adalah sebesar 0,00% dibandingkan dengan target tahun 2024 senilai Rp112.930.000.000,00.

Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 100,00%, dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan I tahun 2023 sebesar 13,59%, sedangkan jika dibandingkan dengan target dalam Renstra 2020-2024 maka IK ini tercapai 0,00% dari target akhir tahun 2024 sebesar Rp112.930.000.000,00.

Belum terealisasinya target IK ini disebabkan oleh kegiatan evaluasi perencanaan dan penganggaran pada 5 (lima) pemerintah daerah yaitu Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Raja Ampat, dan Kota Sorong tahun 2024 pada sektor pengentasan kemiskinan dan penanganan prevalensi *stunting* masih dalam tahap *Quality Assurance* (QA) oleh Rendal.

c. Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah

Sampai dengan triwulan I tahun 2024, realisasi IK “Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah” senilai Rp52.619.567,00. Dengan demikian capaian IK “Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah” adalah sebesar 100,00% dibandingkan target triwulan I tahun 2024 sebesar Rp52.620.000,00 dan sebesar 0,10% dibandingkan target tahun 2024 senilai Rp52.169.300.000,00.

Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 94,05% dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan I tahun 2023 sebesar 1,68%, sedangkan jika dibandingkan dengan target dalam Renstra 2020-2024 maka IK ini tercapai 0,10% dari target akhir tahun 2024 sebesar Rp51.982.000.000,00.

Kegiatan pengawasan dalam upaya kinerja penyelamatan keuangan negara dan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Bidang	Nomor dan Tanggal ST	Uraian Laporan (LHE)	Nilai Temuan (Rp)
Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah Keinvestigasian				
Sub Jumlah Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah Keinvestigasian				0
Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah Non Keinvestigasian				
1	IPP	PE.04.02/ST-34/PW27/2/2024	Audit atas Paket Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam Abrasi Pantai Ruas Jalan Maruni-Oransbari Tahun Anggaran 2023	52.619.567
Sub Jumlah Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah Non Keinvestigasian				52.619.567
Jumlah Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah				52.619.567

2. Meningkatnya Kesadaran Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan pada K/L/D/BU yang Menjadi Tanggung Jawab Perwakilan BPKP

Rata-rata capaian saskeg 2 - Meningkatnya Kesadaran Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan pada K/L/D/BU yang Menjadi Tanggung Jawab Perwakilan BPKP adalah 0%. Capaian saskeg 2 ini diukur dari 1 (satu) IKK yaitu:

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target		Realisasi s.d. TW I 2024	Capaian		Rata-rata Capaian TW I 2024
			Setahun	s.d. TW I 2024		Setahun	s.d. TW I 2024	
II	Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP							
2.1	Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	(%) Persen	80,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Sampai dengan triwulan I tahun 2024, IK “Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti” belum terealisasi. Dengan demikian capaian IK “Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti” adalah sebesar 0% dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 80,00%.

Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 100,00% dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan I tahun 2023 sebesar 32,50%. Indikator kinerja ini baru ditetapkan pada tahun 2023 dan belum ditargetkan pada Renstra 2020-2024, sehingga realisasi indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra 2020-2024.

Belum terealisasinya target IK ini disebabkan oleh mitra belum menindaklanjuti hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat pada triwulan I tahun 2024. Selain itu kegiatan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi strategis akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

3. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional

Rata-rata capaian saskeg 3 - Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional adalah 0,00%. Capaian saskeg 3 ini diukur dari 1 (satu) IKK yaitu:

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target		Realisasi s.d. TW I 2024	Capaian		Rata-rata capaian Tw I 2024
			Setahun	s.d. TW I 2024		Setahun	s.d. TW I 2024	
III	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional							
3.1	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	(%) Persen	85,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Sampai dengan triwulan I tahun 2024, IK “Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan” belum terealisasi. Dengan demikian capaian IK “Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan” sebesar 0,00% dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 85,00%.

Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan I tahun 2023 adalah tetap sebesar 0,00%. Indikator kinerja ini baru ditetapkan pada tahun 2023 dan belum ditargetkan pada Renstra 2020 - 2024, sehingga realisasi indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra 2020-2024.

Belum terealisasinya target IK ini disebabkan APP Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Kelancaran Pembangunan belum dilaksanakan pada triwulan I tahun 2024. Kegiatan pengawasan tersebut akan dilaksanakan pada triwulan III tahun 2024.

4. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha

Rata-rata capaian saskeg 4 - Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha adalah 60,71%. Capaian saskeg 4 ini diukur dari 4 (empat) IKK yaitu:

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target		Realisasi s.d. TW I 2024	Capaian		Rata-rata capaian TW I 2024
			Setahun	s.d. TW I 2024		Setahun	s.d. TW I 2024	
IV	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha							
4.1	Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	1,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	60,71%
4.2	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	4,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4.3	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	1,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%	
4.4	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan	BUMDes	7,00	7,00	10,00	142,86%	142,86%	

a. Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik

Sampai dengan triwulan I tahun 2024, IK “Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik” belum terealisasi. Dengan demikian capaian IK “Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik” adalah

sebesar 0,00% dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 1 (satu) BUMD.

Indikator kinerja ini baru ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan I tahun 2023 dan target Renstra 2020 – 2024.

Belum terealisasinya target IK ini disebabkan oleh APP Pengawasan atas Akuntabilitas dan Tata Kelola BUMD belum dilaksanakan dan akan dilaksanakan pada triwulan III tahun 2024.

b. Jumlah BUMD dengan kinerja sehat

Sampai dengan triwulan I tahun 2024, IK “Jumlah BUMD dengan kinerja sehat” belum terealisasi. Dengan demikian capaian IK “Jumlah BUMD dengan kinerja sehat” sebesar 0,00% dari target tahun 2024 sebanyak 4 (empat) BUMD.

Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 100,00% dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2023 sebesar 100,00%, sedangkan jika dibandingkan dengan target dalam Renstra 2020-2024 maka IK ini tercapai 0,00% dari target akhir tahun 2024 sebanyak 2 BUMD.

Tidak tercapainya indikator kinerja ini disebabkan komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap RSUD maupun BUMD belum optimal. Untuk itu tim BPKP telah meminta dukungan dan komitmen kepada kepala daerah untuk mendorong/menginstruksikan kepada direktur BUMD agar menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.

b. Jumlah BLUD dengan kinerja sehat

Sampai dengan triwulan I tahun 2024, realisasi IK “Jumlah BLUD dengan kinerja sehat” adalah 1 (satu) BLUD. Dengan demikian capaian IK “Jumlah BLUD dengan kinerja sehat” sebesar 100,00% dari target tahun 2024.

Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2023 adalah tetap sebesar 100,00%, sedangkan jika dibandingkan dengan target dalam Renstra 2020-2024 maka IK ini tercapai 100,00% dari target akhir tahun 2024 sebanyak 1 (satu) BLUD.

Indikator “Jumlah BLUD dengan kinerja sehat” dihitung berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada BLUD RSUD Dr. Alberth H. Torey Kabupaten Teluk Wondama pada tahun 2023. Berdasarkan *Balanced Scorecards* ARSADA, capaian kinerja BLUD RSUD Dr. Alberth H. Torey Kabupaten Teluk Wondama pada aspek Pembelajaran dan Pertumbuhan, Proses Layanan Internal, Pelanggan dan Keuangan mendapatkan skor 73,50 atau kategori “Baik” dalam kelompok “BB”. Sedangkan berdasarkan evaluasi tata kelola yang mengacu Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2021 tentang Pedoman Penilaian Tata Kelola dan Kinerja (Tingkat Maturitas) Badan Layanan Umum (dengan dilakukan penyesuaian bagi BLUD RSUD), Kinerja BLUD RSUD Dr. Alberth H. Torey Kabupaten Teluk Wondama yang dinilai pada indikator Perencanaan Strategis, Etika Bisnis, *Stakeholder Relationship*, Manajemen Risiko, Pengawasan dan Pelaporan mendapatkan skor 62,00 atau kategori “cukup” dalam kelompok “B”.

c. Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan

Sampai dengan triwulan I tahun 2024, realisasi IK “Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan” sebanyak 10 (sepuluh) BUMDes. Dengan demikian capaian IK “Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan” sebesar 142,86% dari target tahun 2024.

Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 58,73% dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2023 sebesar 90,00%, sedangkan jika dibandingkan dengan target dalam Renstra 2020-2024 maka IK ini tercapai 142,86% dari target akhir tahun 2024 sebanyak 7 (tujuh) BUMDes.

BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan yaitu:

- 1) BUM Desa Pandu Upokarti Kampung Desay Distrik Prafi
- 2) BUM Desa Mulya Bersama Kampung Prafi Mulya Distrik Prafi
- 3) BUM Desa Sinar Papua Kampung Sidey Baru Distrik Sidey
- 4) BUM Desa Bogakarya Kampung Sumberboga Distrik Masni
- 5) BUM Desa Harapan Jowen Kampung Jowen Distrik Masni
- 6) BUM Desa Macuan Makmur Kampung Macuan Distrik Masni
- 7) BUM Desa Undi Mesta Oruk Kampung Undi Distrik Masni
- 8) BUM Desa Wariori Maju Bersama Kampung Wariori Distrik Masni
- 9) BUM Desa Titian Maju Bersama Kampung Bowi Subur Distrik Masni

10) BUM Desa Bangun Asanyar Kampung Udapi Hilir Distrik Prafi

Untuk mendukung capaian indikator kinerja tersebut berasal dari kegiatan Evaluasi Akuntabilitas dan Tata Kelola BUM Desa Tahun 2023.

5. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi

Rata-rata capaian saskeg 5 - Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi adalah 25,00%. Capaian saskeg 5 ini diukur dari 4 (empat) IKK yaitu:

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target		Realisasi s.d. TW I 2024	Capaian		Rata-rata capaian Tw I 2024
			Setahun	s.d. TW I 2024		Setahun	s.d. TW I 2024	
V	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi							
5.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	(%) Persen	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	25,00%
5.2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	(%) Persen	90,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
5.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	4,00	3,00	3,00	75%	100,00%	
5.4	Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Badan Usaha	2,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

a. Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti

Sampai dengan triwulan I tahun 2024, realisasi IK "Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti" sebesar 0,00%. Hal ini menunjukkan capaian IK "Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti" sebesar 0,00% dari target tahun 2024 sebesar 100,00%.

Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 100,00% dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2023 sebesar 100,00%, sedangkan jika dibandingkan dengan target dalam Renstra 2020-2024 maka IK ini tercapai 0,00% dari target akhir tahun 2024 sebesar 100,00%.

Belum terealisasinya indikator kinerja tersebut disebabkan kegiatan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA) yang masih dalam tahap pelaksanaan.

b. Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti

Sampai dengan triwulan I tahun 2024, realisasi IK "Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti" sebesar 0,00%. Hal ini menunjukkan capaian IK "Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti" adalah 0,00% dari target tahun 2024 sebesar 90,00%.

Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2023 adalah tetap sebesar 0,00%, sedangkan jika dibandingkan dengan target dalam Renstra 2020-2024 maka IK ini tercapai 0,00% dari target akhir tahun 2024 sebesar 90,00%.

Belum terealisasinya indikator kinerja ini disebabkan sampai dengan triwulan I tahun 2024 kegiatan pengawasan preventif dan edukatif berupa sosialisasi dan bimbingan teknis Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan pendampingan Penilaian Mandiri (PM) IEPK masih dalam tahap pelaksanaan. Kegiatan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi yang dihasilkan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

c. Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik

Sampai dengan triwulan I tahun 2024, realisasi IK "Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik" adalah 3 (tiga) pemda. Hal ini menunjukkan capaian IK "Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik" adalah sebesar 100,00% dibandingkan dengan target triwulan I sebanyak 3 (tiga) pemda dan sebesar 75,00% dibandingkan target tahun 2024 sebanyak 4 (empat) pemda.

Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 200,00% dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2023 sebesar 33,33%, sedangkan jika dibandingkan dengan target dalam Renstra 2020-2024 maka IK ini tercapai 75,00% dari target akhir tahun 2024 sebanyak 4 (empat) pemda.

Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik sampai dengan triwulan I tahun 2024 adalah:

- 1) Pemerintah Provinsi Papua Barat;
- 2) Pemerintah Kabupaten Manokwari;
- 3) Pemerintah Kabupaten Kaimana.

Capaian IK ini berdasarkan hasil penilaian IEPK tahun 2023 yang berpedoman pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

d. Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik

Sampai dengan triwulan I tahun 2024, tidak terdapat badan usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik. Hal ini menunjukkan capaian IK "Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik" adalah 0,00% dibandingkan target tahun 2024 sebanyak 2 (dua) Badan Usaha.

Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan I tahun 2023 adalah tetap sebesar 0,00%, sedangkan jika dibandingkan dengan target dalam Renstra 2020-2024 maka IK ini tercapai 0,00% dari target akhir tahun 2024 sebanyak 2 (dua) Badan Usaha.

Kondisi ini disebabkan belum terdapat badan usaha yang telah menerapkan manajemen risiko (MR) maupun satuan pengawas internal (SPI) BLUD secara efektif.

Agenda Prioritas Pengawasan (APP) yang mendukung ketercapaian kinerja saskeg 5 adalah Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Kelancaran Pembangunan.

6. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU

Rata-rata capaian saskeg 6 - Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU adalah 54,55%. Capaian Saskeg 6 ini diukur dari 11 (sebelas) IKK yaitu:

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target		Realisasi s.d. TW I 2024	Capaian		Rata-rata capaian TW I 2024
			Setahun	s.d. TW I 2024		Setahun	s.d. TW I 2024	
VI	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU							
6.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP >= Level 3	Provinsi	1,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%	54,55%
6.2	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP >= Level 3	Kabupaten/ Kota	9,00	4,00	4,00	44,44%	100,00%	
6.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP >= Level 3	Provinsi	1,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%	

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target		Realisasi s.d. TW I 2024	Capaian		Rata- rata capaian TW I 2024
			Setahun	s.d. TW I 2024		Setahun	s.d. TW I 2024	
6.4	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP >= Level 3	Kabupaten/ Kota	12,00	1,00	1,00	8,33%	100,00%	
6.5	Jumlah Kab/Kota dengan MRI >= Level 3	Kabupaten/ Kota	3,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6.6	Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	6,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6.7	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	959,00	102,00	102,00	10,64%	100,00%	
6.8	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	104,00	30,00	30,00	28,85%	100,00%	
6.9	Jumlah BUMD dengan MRI >= Level 3	BUMD	4,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6.10	Jumlah BLU/D dengan MRI >= Level 3	BLUD	1,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6.11	Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPIP >= Level 3	BUMD	1,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

a. Jumlah APIP provinsi dengan kapabilitas APIP \geq level 3

Sampai dengan triwulan I tahun 2024, IK “Jumlah APIP provinsi dengan kapabilitas APIP \geq level 3” sebanyak 1 (satu) APIP Provinsi yaitu Inspektorat Provinsi Papua Barat. Dengan demikian capaian IK “Jumlah APIP provinsi dengan kapabilitas APIP \geq level 3” adalah sebesar 100,00% dibandingkan dengan target triwulan I maupun tahun 2024 sebanyak 1 (satu) Provinsi.

Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan I tahun 2023 adalah tetap sebesar 100,00%.

Capaian indikator kinerja ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kapabilitas APIP pada Inspektorat Provinsi Papua Barat di tahun 2023. Evaluasi dilaksanakan berpedoman pada Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada K/L/P.

b. Jumlah APIP kabupaten/kota dengan kapabilitas APIP \geq level 3

Sampai dengan triwulan I tahun 2024, realisasi IK “Jumlah APIP kabupaten/kota dengan kapabilitas APIP \geq level 3” sebanyak 4 (empat) APIP yaitu Inspektorat Kabupaten Manokwari, Inspektorat Kabupaten Sorong, Inspektorat Kabupaten Kaimana, dan Inspektorat Kota Sorong.

Dengan demikian capaian IK “Jumlah APIP kabupaten/kota dengan kapabilitas APIP \geq level 3” adalah sebesar 100,00% dibandingkan dengan target triwulan I sebanyak 4 (empat) APIP kabupaten/kota dan sebesar 44,44% dibandingkan dengan target tahun 2024 sebanyak 9 (sembilan) kabupaten/kota.

Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 77,76% dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2023 sebesar 25,00%.

Capaian indikator kinerja ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Manokwari dan Inspektorat Kabupaten Sorong di tahun 2022 serta kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Kaimana dan Inspektorat Kota Sorong di tahun 2023.

Evaluasi atas kapabilitas APIP dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada K/L/P.

IK “Jumlah APIP daerah dengan kapabilitas APIP \geq level 3” baik Inspektorat Provinsi maupun Inspektorat Kabupaten/Kota telah tercapai 55,55% dari target akhir tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024 sebanyak 9 APIP.

b. Jumlah provinsi dengan maturitas SPIP \geq level 3

Sampai dengan triwulan I tahun 2024, realisasi IK “Jumlah provinsi dengan maturitas SPIP \geq level 3” sebanyak 1 (satu) provinsi yaitu Provinsi Papua Barat. Dengan demikian capaian IK “Jumlah Provinsi dengan maturitas SPIP \geq level 3” adalah sebesar 100,00% dibandingkan dengan target triwulan I maupun tahun 2024 sebanyak 1 (satu) Provinsi.

Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 100,00% dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan I tahun 2023 sebesar 0,00%.

Capaian indikator kinerja ini diperoleh dari hasil evaluasi atas maturitas SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Papua Barat tahun 2023. Kegiatan penilaian maturitas SPIP Terintegrasi berpedoman pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

c. Jumlah kabupaten/kota dengan maturitas SPIP \geq level 3

Sampai dengan triwulan I tahun 2024, realisasi IK "Jumlah kabupaten/kota dengan maturitas SPIP \geq level 3" adalah 1 (satu) pemda yaitu Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Dengan demikian capaian IK "Jumlah kabupaten/kota dengan maturitas SPIP \geq level 3" adalah sebesar 100,00% dibandingkan dengan target triwulan I sebanyak 1 (satu) kabupaten/kota sebesar 8,33% dibandingkan dengan target tahun 2024 sebanyak 12 (dua belas) kabupaten/kota.

Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 50,03% dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2023 sebesar 16,67%. Hal ini disebabkan karena hasil evaluasi atas maturitas SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Sorong mengalami penurunan dari Level 3 di tahun 2022 menjadi Level 2 di tahun 2023.

Capaian indikator kinerja ini diperoleh dari hasil evaluasi atas maturitas SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat tahun 2023. Kegiatan penilaian maturitas SPIP Terintegrasi berpedoman pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

IK "Jumlah pemda dengan maturitas SPIP \geq level 3" baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota telah tercapai 33,33% dari target akhir tahun 2024 dalam Renstra 2022-2024 yaitu sebanyak 6 Pemda.

e. Jumlah kabupaten/kota dengan MRI \geq level 3

Sampai dengan triwulan I tahun 2024, IK "Jumlah kabupaten/kota dengan MRI \geq level 3" belum terealisasi. Dengan demikian capaian IK "Jumlah kabupaten/kota dengan MRI \geq level 3" adalah sebesar 0,00% dibandingkan dengan target tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) Kabupaten/kota.

Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 100,00% dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2023 sebesar 33,33%, sedangkan jika dibandingkan dengan target dalam Renstra 2020-2024 maka IK ini tercapai 0,00% dari target akhir tahun 2024 yaitu sebanyak 4 (empat) Kabupaten/kota.

Penurunan capaian indikator kinerja ini disebabkan dari hasil evaluasi atas maturitas SPIP Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Sorong mengalami penurunan level MRI dari Level 3 di tahun 2022 menjadi Level 2 di tahun 2023.

Proses evaluasi penerapan MR melekat pada kegiatan evaluasi SPIP Terintegrasi sesuai pedoman Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

f. Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah

Sampai dengan triwulan I tahun 2024, IK “Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah” belum terealisasi. Dengan demikian capaian IK “Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah” adalah sebesar 0,00% dibandingkan dengan target tahun 2024 sebanyak 6 (enam) pemerintah daerah (pemda).

Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan I tahun 2023 adalah tetap sebesar 0,00%. Indikator kinerja ini baru ditetapkan pada tahun 2023 dan belum ditargetkan pada Renstra 2020 - 2024, sehingga realisasi indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra 2020 - 2024.

Realisasi indikator diukur dari pemda yang telah memperoleh opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan hasil evaluasi SAKIP dengan predikat minimal BB. Sampai dengan triwulan I tahun 2024 seluruh LKPD Tahun 2024 di wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya telah memperoleh opini WTP, namun belum terdapat pemda yang memperoleh nilai SAKIP dengan predikat minimal BB.

g. Jumlah desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel

Sampai dengan triwulan I tahun 2024, IK “Jumlah desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel” adalah sebanyak 102 desa. Dengan demikian capaian IK “Jumlah desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel” adalah sebesar 100,00% dibandingkan dengan target triwulan I sebanyak 102 desa dan sebesar 10,64% dibandingkan dengan target tahun 2024 sebanyak 959 desa.

Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 87,88% dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2023 sebesar 88,00%. Indikator kinerja ini baru ditetapkan pada tahun 2023 dan belum ditargetkan pada Renstra 2020 - 2024, sehingga realisasi indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra 2020 - 2024.

Penurunan persentase capaian IK “Jumlah desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel” disebabkan adanya peningkatan target dari 25 desa di tahun 2023 menjadi 959 desa di tahun 2024.

- h. Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai
Sampai dengan triwulan I tahun 2024, IK “Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset secara memadai” adalah sebanyak 30 desa. Dengan demikian capaian IK “Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset secara memadai” adalah sebesar 28,85% dibandingkan dengan target tahun 2024 sebanyak 104 desa.

Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 67,22% dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan I tahun 2023 sebesar 88,00%, sedangkan jika dibandingkan dengan target dalam Renstra 2020-2024 maka indikator kinerja ini tercapai 28,85% dari target akhir tahun 2024 yaitu sebanyak 104 desa.

- i. Jumlah BUMD dengan MRI \geq level 3
Sampai dengan triwulan I tahun 2024, IK “Jumlah BUMD dengan MRI \geq level 3” belum terealisasi. Dengan demikian capaian IK “Jumlah BUMD dengan MRI \geq level 3” adalah sebesar 0,00% dibandingkan dengan target tahun 2024 sebanyak 4 (empat) BUMD.

Indikator kinerja ini baru ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja triwulan I tahun 2023 dan target dalam Renstra 2020-2024.

- j. Jumlah BLUD dengan MRI \geq level 3
Sampai dengan triwulan I tahun 2024, IK “Jumlah BLUD dengan MRI \geq level 3” belum terealisasi. Dengan demikian capaian IK “Jumlah BLUD dengan MRI \geq level 3” adalah sebesar 0,00% dibandingkan dengan target tahun 2024 sebanyak 1 (satu) BLUD.

Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2023 adalah tetap sebesar 0,00%, sedangkan jika dibandingkan dengan target dalam Renstra 2020-2024 maka IK ini tercapai 0,00% dari target akhir tahun 2024 yaitu sebanyak 3 (tiga) BLUD.

Hal ini sesuai hasil mapping oleh Deputi Akuntan Negara tahun 2023 dimana belum ada BLUD di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya yang menerapkan manajemen risiko.

k. Jumlah BUMD dengan kapabilitas SPI \geq level 3

Sampai dengan triwulan I tahun 2024, IK “Jumlah BUMD dengan kapabilitas SPI \geq level 3” belum terealisasi. Dengan demikian capaian IK “Jumlah BUMD dengan kapabilitas SPI \geq level 3” adalah sebesar 0,00% dibandingkan dengan target tahun 2024 sebanyak 1 (satu) BUMD.

Indikator kinerja ini baru ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan I tahun 2023 dan target dalam Renstra 2020-2024.

Agenda Prioritas Pengawasan (APP) yang mendukung ketercapaian kinerja saskeg 6 adalah:

- a. Maturitas SPIP Terintegrasi - Pemerintah Daerah ;
- b. Kapabilitas APIP;
- c. Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Desa
- d. Manajemen Risiko Badan Usaha dan Badan Layanan;

7. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Unit Kerja

Rata-rata capaian saskeg 7 - Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Unit Kerja adalah 85,71%. Capaian saskeg 7 ini diukur dari 7 (tujuh) IKK yaitu:

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target		Realisasi	Capaian		Rata-rata capaian TW I 2024
			Setahun	s.d. TW I 2024		Setahun	s.d. TW I 2024	
VII	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Unit Kerja							
7.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75,00	81,07	81,07	108,09%	100,00%	85,71%
7.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82,00	82,15	82,15	100,18%	100,00%	
7.3	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	(%) Persen	70,00	90,00	90,00	128,57%	100,00%	

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target		Realisasi	Capaian		Rata-rata capaian TW I 2024
			Setahun	s.d. TW I 2024		Setahun	s.d. TW I 2024	
7.4	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	(%) Persen	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
7.5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75,00	84,35	84,35	112,47%	100,00%	
7.6	Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100	95,00	91,56	91,56	96,4%	100,00%	
7.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80,00	97,60	97,60	122,00%	100,00%	

a. Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja

Sampai dengan triwulan I tahun 2024, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat telah memperoleh skor Zona Integritas sebesar 81,07. Dengan demikian capaian IKP “Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja” terealisasi sebesar 108% dari target tahun 2024 sebesar skor 75,00.

Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 6,87% dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2023 sebesar 115,97%, sedangkan jika dibandingkan dengan target dalam Renstra 2020-2024 maka IK ini tercapai 102,62% dari target akhir tahun 2024 sebesar 79,00.

Skor Zona Integritas tersebut diperoleh dari hasil penilaian mandiri/*self assessment* Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat pada tahun 2023.

b. Nilai SAKIP Unit Kerja

Sampai dengan triwulan I tahun 2024, Nilai SAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat adalah 82,15. Dengan demikian capaian IKK “Nilai SAKIP unit kerja” terealisasi sebesar 100,18% dari target tahun 2024 sebesar 82,00.

Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 4,97% dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2023 sebesar 105,43%, sedangkan jika dibandingkan dengan target dalam Renstra 2020-2024 maka IK ini tercapai 97,80% dari target akhir tahun 2024 sebesar 84,00.

Nilai SAKIP tersebut diperoleh dari hasil evaluasi oleh Inspektorat BPKP atas penilaian mandiri/*self assessment* Perwakilan BPKP Provinsi Papua

Barat tahun 2023. Evaluasi SAKIP tahun 2024 oleh Inspektorat BPKP akan dilaksanakan pada triwulan III tahun 2024.

c. Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP unit kerja)

Sampai dengan triwulan I tahun 2024, persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP unit kerja) adalah 90,00%. Dengan demikian capaian IKK “Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP unit kerja)” terealisasi sebesar 128,57% dari target tahun 2024 sebesar 70,00%.

Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 10,00% dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2023 sebesar 142,86%. Indikator kinerja ini baru ditetapkan pada tahun 2023 dan belum ditargetkan pada Renstra 2020-2024, sehingga realisasi indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra 2020-2024.

Persentase efektivitas pengendalian intern diperoleh dari efektivitas kegiatan pengendalian di tahun 2023. Evaluasi atas efektivitas kegiatan pengendalian tahun 2024 akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2024.

d. Persentase penyelesaian RTP (MR unit kerja)

Sampai dengan triwulan I tahun 2024, penyelesaian RTP (MR unit kerja) belum terealisasi. Dengan demikian capaian IKP “Persentase penyelesaian RTP (MR unit kerja)” tercapai sebesar 0,00% dibandingkan target tahun 2024 sebesar 100,00%.

Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2023 adalah tetap sebesar 0,00%. Indikator kinerja ini baru ditetapkan pada tahun 2023 dan belum ditargetkan pada Renstra 2020-2024, sehingga realisasi indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra 2020-2024.

Selama triwulan I 2024 kegiatan penyelenggaraan Manajemen Risiko (MR) unit kerja yang telah dilaksanakan yaitu *updating* identifikasi risiko tahun 2024 serta penyusunan RTP atas risiko prioritas.

e. Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja

Sampai dengan triwulan I tahun 2024, Indeks Kualitas Layanan Eksternal Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat memperoleh skor sebesar 84,35. Dengan demikian capaian IKP “Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit

Kerja” terealisasi sebesar 112,47% dari target skor tahun 2024 sebesar 75,00.

Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 7,30% dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2023 sebesar 121,33%, sedangkan jika dibandingkan dengan target dalam Renstra 2020-2024 maka IK ini tercapai 105,43% dari target akhir tahun 2024 sebesar 80,00.

Capaian indeks tersebut diperoleh dari penilaian layanan selama tahun 2023. Penilaian atas indeks kualitas layanan tahun 2024 akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2024.

f. Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)

Sampai dengan triwulan I tahun 2024, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat memperoleh skor IKPA sebesar 91,56. Dengan demikian capaian IKP “Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)” terealisasi sebesar 96,38% dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 95,00.

Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 5,86% dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2023 sebesar 102,38%, sedangkan jika dibandingkan dengan target dalam Renstra 2020-2024 maka IK ini tercapai 101,73% dari target akhir tahun 2024 sebesar 90,00.

Skor IKPA tersebut diperoleh dari hasil penilaian pada aplikasi spanint.kemenkeu.go.id pada tahun 2023. Penilaian atas skor IKPA unit kerja tahun 2024 akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2024.

g. Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)

Sampai dengan triwulan I tahun 2024, Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri) telah mencapai 97,60. Dengan demikian capaian IKP “Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)” terealisasi sebesar 122% dibandingkan target tahun 2024 sebesar 80,00.

Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 5,26% dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2023 sebesar 115,90%. Indikator kinerja ini baru ditetapkan pada tahun 2023 dan belum ditargetkan pada Renstra 2020-2024, sehingga realisasi indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra 2020-2024.

Nilai pengelolaan BMN tersebut diperoleh berdasarkan hasil penilaian mandiri tahun 2023. Penilaian atas Pengelolaan BMN Unit Kerja tahun 2024 akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2024.

Rincian target dan realisasi *outcome* sesuai perjanjian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 1**.

B. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun 2023 oleh Inspektorat BPKP sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi Nomor PE.09/LHP-324/IN/1/2023 tanggal 28 November 2023, dengan rincian sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Berkoordinasi dengan Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Tata Kelola untuk: a. Menentukan target kinerja tahun berikutnya dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya. b. Menyelaraskan rumus pengukuran dan definisi operasional IKK pada dokumen laporan kinerja dan profil indikator di aplikasi e-SAKIP.	a. Telah ditindaklanjuti dengan berkoordinasi melalui forum resmi maupun non resmi. b. Rumus pengukuran dan definisi IKK telah diselaraskan dengan profil indikator pada aplikasi e-SAKIP
2	Memperhatikan sistematika dan penyajian LKj untuk penyusunan LKj periode berikutnya sesuai Surat Edaran Sekretaris Utama Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Kinerja Tahunan (LKj) di Lingkungan BPKP ter-update.	Penyusunan LKj telah mengacu pada Surat Sekretaris Utama BPKP maupun Surat Kepala Biro Manajemen Kinerja Organisasi Dan Tata Kelola (MKOT)

C. Rencana dan Realisasi Output

Sesuai Surat Edaran Sekretaris Utama BPKP Nomor SE-3/SU/01/2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Kebijakan Teknis Manajemen Kinerja dan Anggaran, *output* pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat diukur dari terbitnya Sintesis Hasil Pengawasan (SHP) setiap topik pengawasan. Berdasarkan RKA tahun 2024 jumlah *output* pengawasan yang ditargetkan sebanyak 56 SHP.

Realisasi *output* pengawasan sampai dengan triwulan I tahun 2024 sebanyak 17 SHP atau tercapai 30,36% dari target setahun sebanyak 56 SHP. Realisasi *output* berdasarkan program adalah sebagai berikut:

No.	Program	Satuan	Target 2024	Realisasi s.d. Tw I	Capaian (%)
A	Pengawasan Pembangunan di seluruh Perwakilan (3701)	SHP	56	17	30,36%
B	Program Dukungan Manajemen (3676)	Layanan/Unit	10	2	20,00%
Total			66	19	28,79

Rincian rencana dan realisasi *output* s.d. triwulan I tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 2.**

D. Penyerapan Anggaran

Realisasi anggaran sampai dengan 22 Maret 2024 sebesar Rp4.517.446.618,00 atau 13,60% dibandingkan dengan anggaran tahun 2024 sebesar Rp33.215.693,00. Rincian realisasi anggaran berdasarkan program adalah sebagai berikut:

No	Program	Anggaran Tahun 2024 (Rupiah)	Realisasi s.d. TW I (Rupiah)	Capaian (%)
A	Pengawasan Pembangunan di seluruh Perwakilan (3701)	8.192.086.000	459.094.772	5,60%
B	Program Dukungan Manajemen (3676)	25.023.607.000	4.058.351.846	16,22%
Total		33.215.693.000	4.517.446.618	13,60%

Rincian rencana dan realisasi anggaran berdasarkan RO disajikan pada **Lampiran 3.**

Demikian Laporan Kinerja (LKj) sampai dengan triwulan I tahun 2024 kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Lepot Setyanto

Tembusan:

Yth. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK selaku Deputi Pembina

Pegawai BPKP dalam melaksanakan tugas tidak menerima/meminta gratifikasi dan suap. Apabila pegawai BPKP menerima/meminta gratifikasi dan suap, dapat dilaporkan melalui mekanisme penyampaian pengaduan pada wbs.bpkp.go.id. atau menghubungi 085210991239.

Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat
Target dan Realisasi Outcome
Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2024

1	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET		REALISASI S.D. TW I	CAPAIAN		RERATA CAPAIAN TW I
					4	5		7	8	
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1.1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	921.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	33.33%
		1.2	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	112,930.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		1.3	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	52,169.30	52.62	52.62	0.10%	100.00%	
2	Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP	2.1	Persentase rekomendasi strategis yang ditindak lanjuti	(%) Persen	80.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	3.1	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	(%) Persen	85.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	4.1	Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	60.71%
		4.2	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	4.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		4.3	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	
		4.4	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	7.00	7.00	10.00	142.86%	142.86%	
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	5.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	(%) Persen	100.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	25.00%
		5.2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	(%) Persen	90.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		5.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	4.00	3.00	3.00	75.00%	100.00%	
		5.4	Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Badan Usaha	2.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET		REALISASI S.D. TW I	CAPAIAN		RERATA CAPAIAN TW I	
				SETAHUN	S.D. TW I		SETAHUN	S.D. TW I		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	6.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP >= Level 3	Provinsi	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	54.55%
		6.2	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP >= Level 3	Kabupaten/Kota	9.00	4.00	4.00	44.44%	100.00%	
		6.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP >= Level 3	Provinsi	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	
		6.4	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP >= Level 3	Kabupaten/Kota	12.00	1.00	1.00	8.33%	100.00%	
		6.5	Jumlah Kab/Kota dengan MRI >= Level 3	Kabupaten/Kota	3.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		6.6	Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	6.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		6.7	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	959.00	102.00	102.00	10.64%	100.00%	
		6.8	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	104.00	30.00	30.00	28.85%	100.00%	
		6.9	Jumlah BUMD dengan MRI >= Level 3	BUMD	4.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		6.10	Jumlah BLU/D dengan MRI >= Level 3	BLU/D	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		6.11	Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI >= Level 3	BUMD	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Unit Kerja	7.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	(%) Persen	75.00	81.07	81.07	108.09%	100.00%	85.71%
		7.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	(%) Persen	82.00	82.15	82.15	100.18%	100.00%	
		7.3	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	Indeks Skala 100	70.00	90.00	90.00	128.57%	100.00%	
		7.4	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	Indeks Skala 100	100.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		7.5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75.00	84.35	84.35	112.47%	100.00%	
		7.6	Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100	95.00	91.56	91.56	96.38%	100.00%	
		7.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80.00	97.60	97.60	122.00%	100.00%	

Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi

No.	Bidang	Nomor dan Tanggal ST	Nomor LHP	Uraian ST	Nilai Temuan
					-

Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah

No.	Bidang	Nomor dan Tanggal ST	Nomor LHP	Uraian ST	Nilai Temuan
Investigatif					
Sub Jumlah Keinvestigasian					-
Non Investigatif					
Sub Jumlah Non Investigasi					-
Jumlah					-

Nilai Penyelamatan Keuangan negara dan daerah

No.	Bidang	Nomor dan Tanggal ST	Nomor LHP	Uraian ST	Nilai Temuan
Investigatif					
Sub Jumlah Keinvestigasian					-
Non Investigatif					
1	IPP	PE.04.02/ST-34/PW27/2/2024	12 February 2024 DL3	Audit atas Paket Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam Abrasi Pantai Ruas Jalan Maruni-Oransbari Tahun Anggaran 2023	52,619,567
Sub Jumlah Non Investigasi					52,619,567
Jumlah					52,619,567

Persentase rekomendasi strategis yang ditindak lanjuti

No.	Bidang	Rekomendasi Strategis	Tindak Lanjut yang Telah dilakukan	% TL
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

**Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat
 Target dan Realisasi *Output*
 Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2024**

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rencana		Realisasi	Capaian (%)	
		Tahun 2024	s.d. Triwulan I	s.d. Triwulan I	Tahun 2024	s.d. Triwulan I
2	3	4	5	6	7	8=6/5
3701.FAG.U11 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa	Sintesa Hasil Pengawasan (SHP)	4	2	2	50%	100%
3701.FAG.U31 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	Sintesa Hasil Pengawasan (SHP)	1	0	0	0%	0%
3701.FAG.U71 Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	Sintesa Hasil Pengawasan (SHP)	2	1	1	50%	100%
3701.FAG.U82 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pemilu dan Pilkada	Sintesa Hasil Pengawasan (SHP)	4	1	0	0%	0%
3701.FAG.U12 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah	Sintesa Hasil Pengawasan (SHP)	1	0	0	0%	0%
3701.FAG.U81 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Peningkatan Kualitas Pendidikan	Sintesa Hasil Pengawasan (SHP)	4	0	0	0%	0%
3701.FAG.U83 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Prioritas Nasional dan Daerah	Sintesa Hasil Pengawasan (SHP)	3	1	1	33.33%	100%
3701.FAG.U84 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Program Ekonomi Hijau	Sintesa Hasil Pengawasan (SHP)	1	0	0	0%	0%
3701.FAG.U85 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengembangan Wilayah	Sintesa Hasil Pengawasan (SHP)	2	0	1	50%	100%
3701.FAG.U86 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting	Sintesa Hasil Pengawasan (SHP)	2	0	0	0%	0%
3701.UAG.U21 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia	Sintesa Hasil Pengawasan (SHP)	11	5	5	45.45%	100%
3701.UAG.U22 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Infrastruktur dan Konektivitas	Sintesa Hasil Pengawasan (SHP)	7	2	3	42.86%	150%
3701.UAG.U23 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi	Sintesa Hasil Pengawasan (SHP)	4	0	0	0%	0%

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rencana		Realisasi	Capaian (%)	
		Tahun 2024	s.d. Triwulan I	s.d. Triwulan I	Tahun 2024	s.d. Triwulan I
3701.UAG.U24 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	Sintesa Hasil Pengawasan (SHP)	1	1	1	100.00%	100%
3701.UAG.U41 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan	Sintesa Hasil Pengawasan (SHP)	2	1	1	50.00%	100%
3701.UAG.U52 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	Sintesa Hasil Pengawasan (SHP)	3	0	2	66.67%	100%
3701.UAG.U53 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	Sintesa Hasil Pengawasan (SHP)	4	0	0	0%	0%
Jumlah <i>Output</i> Pengawasan	Sintesa Hasil Pengawasan (SHP)	56	14	17	30.36%	121.43%
3676.EBA.962 Layanan Umum	Layanan	1	1	1	100%	100%
3676.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	100%	100%
3676.EBB.951 Layanan Sarana Internal	Unit/Paket	2	0	0	0%	0%
3676.EBB.971 Layanan Prasarana Internal	Paket	6	0	0	0%	100%
Jumlah <i>Output</i> Dukungan Pengawasan	Unit/Paket/Layanan	10	2	2	20%	100%
Jumlah		66	16	19	28.79%	118.75%

Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat
Target dan Realisasi Anggaran serta Efisiensi Terhadap Output
Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Dana (Rp)			Output (SHP)			Efisiensi
			Anggaran Tahun 2024	Realisasi s.d. Triwulan I	Capaian Dana	Target Tahun 2024	Realisasi s.d. Triwulan I	Capaian Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. Kegiatan Pengawasan									
1	3701.FAG.U11 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa	Sintesa Hasil Pengawasan (SHP)	685,652,000	94,037,330	13.72%	4	2	50%	Efisien
2	3701.FAG.U31 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	Sintesa Hasil Pengawasan (SHP)	70,620,000	605,000	0.86%	1	-	0%	Tidak efisien
3	3701.FAG.U71 Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	Sintesa Hasil Pengawasan (SHP)	300,000,000	25,114,502	8.37%	2	1	50%	Efisien
4	3701.FAG.U82 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pemilu dan Pilkada	Sintesa Hasil Pengawasan (SHP)	822,989,000	-	0%	4	-	0%	Tidak efisien
5	3701.FAG.U12 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah	Sintesa Hasil Pengawasan (SHP)	182,451,000	1,899,500	1.04%	1	-	0%	Tidak efisien
6	3701.FAG.U81 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Peningkatan Kualitas Pendidikan	Sintesa Hasil Pengawasan (SHP)	1,382,815,000	10,525,000	0.76%	4	-	0%	Tidak efisien
7	3701.FAG.U83 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Prioritas Nasional dan Daerah	Sintesa Hasil Pengawasan (SHP)	908,253,000	57,610,000	6.34%	3	1	33.33%	Efisien
8	3701.FAG.U84 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Program Ekonomi Hijau	Sintesa Hasil Pengawasan (SHP)	132,256,000	-	0%	1	-	0%	-
9	3701.FAG.U85 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengembangan Wilayah	Sintesa Hasil Pengawasan (SHP)	200,061,000	-	0%	2	1	50%	Efisien

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Dana (Rp)			Output (SHP)			Efisiensi
			Anggaran Tahun 2024	Realisasi s.d. Triwulan I	Capaian Dana	Target Tahun 2024	Realisasi s.d. Triwulan I	Capaian Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	3701.FAG.U86 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting	Sintesa Hasil Pengawasan (SHP)	500,152,000	-	0%	2	-	0%	-
11	3701.UAG.U21 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia	Sintesa Hasil Pengawasan (SHP)	935,489,000	125,214,200	13.38%	11	5	45.45%	Efisien
12	3701.UAG.U22 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Infrastruktur dan Konektivitas	Sintesa Hasil Pengawasan (SHP)	405,179,000	20,150,000	4.97%	7	3	42.86%	Efisien
13	3701.UAG.U23 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi	Sintesa Hasil Pengawasan (SHP)	398,834,000	-	0%	4	-	0%	-
14	3701.UAG.U24 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	Sintesa Hasil Pengawasan (SHP)	88,170,000	51,958,440	58.93%	1	1	100%	Efisien
15	3701.UAG.U41 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan	Sintesa Hasil Pengawasan (SHP)	562,942,000	15,000,000	2.66%	2	1	50%	Efisien
16	3701.UAG.U52 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	Sintesa Hasil Pengawasan (SHP)	251,322,000	30,413,200	12.10%	3	2	66.67%	Efisien
17	3701.UAG.U53 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	Sintesa Hasil Pengawasan (SHP)	364,901,000	26,567,600	7.28%	4	-	0%	Tidak efisien
Jumlah Output Pengawasan			8,192,086,000	459,094,772	5.60%	56	17	30.36%	Efisien
B. Kegiatan Dukungan Pengawasan									
12	3676.EBA.962 Layanan Umum	Layanan	864,720,000	128,899,116	14.91%	1	1	100%	Efisien
13	3676.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan	19,052,923,000	3,929,452,730	20.62%	1	1	100%	Efisien
14	3676.EBB.951 Layanan Sarana Internal	Unit/Paket	5,964,000	-	0%	2	-	0%	-
15	3676.EBB.971 Layanan Prasarana Internal	Paket	5,100,000,000	-	0%	6	-	0%	-
Jumlah Output Non Pengawasan			25,023,607,000	4,058,351,846	16.22%	10	2	20%	
Jumlah			33,215,693,000	4,517,446,618	13.60%	66	19	28.79%	Efisien

Keterangan:

Capaian *output* tidak efisien dikarenakan kegiatan masih dalam pelaksanaan sehingga belum seluruh *output* dihasilkan.